

**Analisis Efektifitas Sistem Informasi Manajemen Daerah Untuk Pengelolaan  
Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan  
Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi sebagian syarat*

*Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S,AK)*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

**NAFISCHA ERNING NABILAH**

**NPM: 1705170254**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, pukul 09.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN**

Nama : NAFISCHA ERNING NABILAH  
 NPM : 1795170254  
 Program Studi : AKUNTANSI  
 Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIFITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**TIM PENGUJI**

Penguji I :   
 Dr. WIDIA ASTUTY, SE., M.Si., Ak., QIA.CA  
 Penguji II :   
 SURYA SANJAYA, SE., M.AK

**Pembimbing**

Dr. EKA NURMALASARI, SE., Ak. M.Si.CA

**PANITIA UJIAN**

Ketua :   
 H. JANURI, S.E., M.M., M.Si  
 Sekretaris :   
 Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : NAFISCHA ERNING NABILAH

N.P.M : 1705170254

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIFITAS SISTEM INFORMASI  
MANAJEMEN DAERAH UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2021

Pembimbing Skripsi

(Dr EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si.)

Diketahui/Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Dr. JANISRI, S.E., M.M., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3, Medan, Telp. (061) 6624567, Kode Pos 20238

**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Nafischa Erning Nabilah  
NPM : 1705170254  
Dosen Pembimbing : Dr.Eka Nurmala Sari, SE,M.Si  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Penelitian : Analisis Efektifitas Sistem Informasi Manajemen Daerah Untuk  
Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Provinsi Sumatera Utara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab I	_____		
Bab II	_____		
Bab III	_____		
Bab IV	_____		
Bab V	perbaiki lampiran	5/10 2021	3/
Daftar Pustaka	_____		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	ACE dari Skripsi langsung selay	5/10 2021	3/

Medan, Oktober 2021

Diketahui oleh :  
Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr Zulia Hanum, SE, M.Si)

Disetujui Oleh :  
Dosen Pembimbing

(Dr.Eka Nurmala Sari, SE,M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mochtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nafischa Erning Nabilah  
NPM : 1705170254  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Skripsi : **ANALISIS EFEKTIFITAS SISTEM INFORMASI  
MANAJEMEN DAERAH UNTUK PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA  
UTARA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, **28** Oktober 2021

Saya yang menyatakan



**Nafischa Erning Nabilah**

## **ABSTRAK**

### **Analisis Efektifitas Sistem Informasi Manajemen Daerah Untuk Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara**

Nafischa Erning Nabilah

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Program Studi Akuntansi

[Nafischanabilah12@gmail.com](mailto:Nafischanabilah12@gmail.com)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara apakah telah dijalankan secara efektif. metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini adalah pegawai BPKAD PROVSU dibidang anggaran. Teknik analisis data dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Simda yang diterapkan pada BPKAD PROVINSI SUMATERA UTARA sudah efektif untuk mengelola keuangan daerah . dapat dilihat dari indikator efektifitas simda yaitu Integrasi, Fleksibilitas, Aksesibilitas, Formalisasi, Media.

namun, eror kecil sudah terjadi dalam mengelola keuangan disebabkan karena simda tidak terintegrasi dengan aplikasi lain, simda masih kurang fleksibel dalam pengembangan programnya.

**Kata kunci : Efektifitas Simda, Pengelolaan keuangan**

## **ABSTRACT**

### **Analysis of the Effectiveness of Regional Management Information Systems for Regional Financial Management at the Regional Financial and Asset Management Agency of North Sumatra Province**

Nafischa Erning Nabilah

Muhammadiyah University of North Sumatra

Accounting Study Program

[Nafischanabilah12@gmail.com](mailto:Nafischanabilah12@gmail.com)

The purpose of this study is to find out and analyze how the implementation of the Regional Management Information System (SIMDA) for Financial Management at the Regional Financial and Asset Management Agency of North Sumatra Province has been carried out effectively. The research method used is descriptive qualitative method. Data collection techniques using interviews and documentation. The resource persons in this study were employees of BPKAD PROVSU in the field of budgeting. The data analysis technique starts from data collection, data reduction, data presentation, and data conclusions. The results of this study indicate that the Simda applied to the BPKAD of NORTH SUMATRA PROVINCE has been effective in managing regional finances. can be seen from the indicators of simda effectiveness, namely Integration, Flexibility, Accessibility, Formalization, Media. However, a small error has occurred in managing finances because SIMDA is not integrated with other applications, SIMDA is still less flexible in program development.

**Keywords: Simda Effectiveness, Financial Management**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat menyelesaikan pendidikan S1 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dalam hal ini maupun pemakaian bahasa sehingga penulis memohon kritikan yang membangun serta saran untuk penulisan selanjutnya.

Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Analisis Efektifitas Sistem Informasi Manajemen Daerah Untuk Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara”**. Dalam menyelesaikan skripsi ini mulai dari proses awal sampai akhir penyelesaian, penulis telah banyak menerima bantuan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua penulis tercinta, Ayahanda Eriawan S.E dan Ibunda penulis Surya Ningsih S.Pd yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik serta memberikan bimbingan, nasehat, doa, dorongan moril, materi, motivasi serta kasih sayang

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dan kepada keluarga besar terutama Adik kandung penulis Nafarisah Erning Salsabilah yang sudah memberikan dukungan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. penulis juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Assoc Prof Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, S.E., MM. M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan S.E., M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr Zulia Hanum S.E, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap S.E, M.Si selaku sekretaris program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr Eka Nurmala Sari S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Syafrida Hani S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini memberikan nasehan dan arahan mengenai akademik.

9. Seluruh dosen beserta staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dari awal kuliah hingga sekarang.
  10. Sahabat saya Gsquad dan semua teman stambuk 2017 yang telah memberikan semangat dukungan, serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
  11. Tak lupa penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak – pihak terkait lainnya yang telah membantu penulis dalam melakukan pembuatan skripsi ini.
- Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang berguna dan membangun untuk kelengkapan laporan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca demi kemajuan perkembangan ilmu pendidikan di masa yang akan datang.

*Aamiin ya Rabbal'alam*

*Billahi fii sabilil Haq Fastabiqul Khairat*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Medan, Oktober 2021

Penulis

**NAFISCHA ERNING NABILAH**

**1705170254**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	6
1.3 Rumusan Masalah .....	6
1.4 Tujuan Penelitian .....	6
1.5 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	8
2.1 Tinjauan Teori.....	8
2.1.1 Pengertian Efektifitas .....	8
2.1.2 Sistem Informasi Manajemen .....	12
2.1.3 Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan.....	19
2.1.4 Teori Implementasi Kebijakan Simda.....	24
2.1.5 Pengelolaan Keuangan Daerah.....	25
2.2 Penelitian Terdahulu .....	29
2.3 Kerangka Konseptual.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>40</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	40

3.2. Definisi Operasional .....	40
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian.....	41
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	42
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.6. Teknik Analiss Data.....	45
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	46
4.2 Deskripsi Data.....	52
4.3 Pembahasan.....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>
<b>Daftar Riwayat Hidup.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	42
Tabel 3.2 Jumlah Pertanyaan Berdasarkan Indikator Efektifitas Simda.....	43
Tabel 3.3 Jumlah Pertanyaan Berdasarkan Indikator Pengelolaan Keuangan....	44
Tabel 4.1 Indikator Kesesuaian Efektifitas Simda Integrasi.....	54
Tabel 4.2 Indikator Kesesuaian Efektifitas Simda Flesibilitas.....	54
Tabel 4.3 Indikator Kesesuaian Efektifitas Simda Aksesibilitas.....	55
Tabel 4.4 Indikator Kesesuaian Efektifitas Simda Formalisasi.....	56
Tabel 4.5 Indikator Kesesuaian Efektifitas Simda Media.....	57
Tabel 4.6 Indikator Kesesuaian Pengelolaan Keuangan Daerah.....	58

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	39
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKAD PROVSU.....	49

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang tergolong berkembang yang memiliki tiga sektor penting dalam perekonomian, yaitu sektor publik, swasta, dan koperasi. Perkembangan pada sektor publik tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah, dimana pemerintah merupakan entitas sektor publik yang paling besar dan dominan. yang dimaksud sektor publik adalah pemerintah dan unit-unit organisasinya, yaitu unit-unit yang dikelola pemerintah dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau pelayanan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan bidang sumber daya (Halim, 2008).

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Otonomi daerah mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2004 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 digantikan Undang-Undang No 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang No 32 Tahun 2004.

menurut pasal 386 Undang-undang no 23, 2014 Pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur

dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Efektivitas penerapan sistem informasi merupakan hasil yang di peroleh dari suatu instansi mencerminkan sejauh mana instansi tersebut mampu menghasilkan laporan keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya pemerintah yang baik dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah.

Sistem informasi merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Menurut (Hall, 2001) sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada para pemakai. Kriteria dari sistem informasi antara lain, fleksibel, efektif dan efisien.

Salah satu bentuk teknologi informasi direalisasikan dalam bentuk system informasi terkomputerisasi yang disebut system informasi manajemen daerah (SIMDA) Keuangan. SIMDA Keuangan dirancang oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan suatu system informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk

melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja.

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebuah sistem berbasis aplikasi teknologi yang dikembangkan untuk mendukung tercapainya akuntabilitas bagi pemerintah daerah baik ditingkat pelaporan (SKPKD) ataupun ditingkat akuntansi (SKPD). Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan dan penatausahaan APBD dan pertanggungjawaban.

Pemanfaatan teknologi informasi bukan lagi merupakan kemewahan akan tetapi sudah merupakan keharusan. Efisien, efektifitas, dan produktifitas kerja organisasi atau perusahaan baik pada tingkat individu, kelompok maupun pada tingkat organisasi atau perusahaan sebagai keseluruhan dapat ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi tersebut.

Alasan meneliti di BPKAD Provinsi Sumatera Utara karena sudah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang sebelumnya menggunakan sistem manual atau penyusunan menggunakan Microsoft Excel. Tujuan dari Penerapan SIMDA ini adalah untuk menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap akurat dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik pada umumnya dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dengan menyediakan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi pada khususnya.

Teknologi informasi suatu organisasi digunakan untuk meningkatkan kinerja para individual sebagai anggota organisasi yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi. Penggunaan sistem informasi dibidang akuntansi, merupakan proses penggabungan berbagai komponen baik yang mempunyai bentuk fisik (hardware), maupun non fisik (software) yang saling berhubungan dan berintegrasi secara harmonis yang akan membantu penggunaanya dalam mencatat, mengolah transaksi baik keuangan maupun non keuangan yang selanjutnya menghasilkan informasi yang digunakan oleh manajemen sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (Susanto, 2013)

Berdasarkan hasil dari Wawancara langsung yang penulis lakukan dengan staff BPKAD provinsi sumatera utara bahwa ada beberapa faktor yang membuat simda menjadi efektif dan beberapa faktor kendala dalam simda. Dimana faktor yang membuat simda menjadi efektif yaitu, Simda sudah lama diterapkan atau diimplementasikan karena sudah matang dalam metode trial and erornya. Kemudian, Pengguna Simda merupakan orang-orang yang memiliki latar belakang akuntansi khususnya akuntansi pemerintahan (akuntansi sektor publik. sedangkan faktor yang menjadi kendala simda yaitu Operator yang menggunakan simda karena tidak semua operator memiliki pemahaman yang sama dan tidak semua operator teliti dalam memasukkan data keuangan dalam menggunakan simda.. serta kurangnya pengawasan terhadap aplikasi simda tersebut.

Dari beberapa Faktor Kendala simda tersebut maka staff BPKAD provsu mengatakan terjadilah beberapa dampak dalam ketidak efektifitasan

dalam simda. yaitu, dapat membatasi ruang belajar bagi operator-operator yang memahami kegunaan simda sehingga kurangnya perkembangan Sumber daya manusia. Kemudian, simda tidak bisa terintegrasi dengan aplikasi luar. Oleh karena itu, terkadang sebagai pengelola pemerintahan/staff membutuhkan sumber data keuangan yang ada didalam simda tetapi tidak bisa diambil dari luar simda karena fiturnya belum ada. Biasanya bisa dibantu dengan integrasi aplikasi lain karena sifat simda tersebut yang tertutup maka terkadang membuat kebutuhan pengelola pemerintah/staff masih ada yang belum terakomodir. serta, pengawasan yang hanya dimiliki satu lembaga maka pengelola pemerintah/staff membutuhkan waktu dalam mengatasi suatu masalah. Sehingga mengalami kesulitan jika ada hal-hal yang mendesak terjadi.

Untuk itu BPKAD Provinsi Sumatera Utara dalam menggunakan aplikasi simda merupakan hal yang sangat penting menyangkut dalam kemajuan laporan keuangan organisasi, Jika kepuasan suatu organisasi dapat terpenuhi maka pegawai akan dapat berprestasi dan dapat bekerja dengan efektif dan efisien sesuai yang diharapkan oleh BPKAD Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hal tersebut, untuk memperoleh gambaran lebih jauh tentang Efktivitas SIMDA Keuangan maka peneliti mengambil judul sebagai berikut. **”Analisis efektifitas sistem informasi manajemen daerah untuk pengelolaan keuangan daerah pada badan pengelolaan keuangan daerah provinsi sumatera utara”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditemukan bahwa identifikasi permasalahan yang timbul yaitu:

1. Aplikasi simda yang diterapkan oleh BPKAD masih kurang efektif
2. Aplikasi simda yang digunakan masih kurang terintegrasi dengan aplikasi lainnya
3. Operator yang menggunakan simda masih ada yang kurang paham dalam mengoperasikan simda

## **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Keefektifitasan aplikasi Simda yang diterapkan oleh BPKAD Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Menggunakan Simda?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara apakah telah dijalankan secara efektif.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Penulis**

Sebagai bukti akurat tentang efektifitas sistem informasi manajemen daerah untuk pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

### **2. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan efektifitas dalam mengelola keuangan yang telah dianggarkan oleh pemerintah agar menghasilkan sebuah laporan keuangan yang tepat dan akurat.

### **3. Bagi Mahasiswa**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulisan di masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Efektivitas**

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Menurut (Journal et al., 2019) Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika efisiensi berfokus pada output dan proses maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil).

Efektivitas berfokus pada outcome (hasil) status organisasi, program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.

Setiap organisasi atau lembaga di dalam kegiatannya menginginkan adanya pencapaian tujuan. Tujuan dari suatu lembaga akan berjalan dengan efektif apabila didukung oleh faktor-faktor pendukung dari efektivitas. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program atau kegiatan untuk mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan oleh organisasi.

Menurut (Sigit, 2003) Efektifitas adalah suatu kontinum yang merentang dari efektif, kurang efektif, sedang-sedang, sangat kurang sampai tidak efektif.

Efektif sejauh mana tujuan (organisasi) dapat dicapai untuk kena sasaran yang ingin dicapai dalam suatu organisasi.

Menurut (Steers, 1985) mengatakan beberapa ukuran dari efektivitas, yaitu:

1. Kualitas artinya kualitas yang menghasilkan oleh organisasi
2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan
3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik
4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut.
5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi
6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi
7. Stabilitas adalah pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu
8. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu
9. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan.
10. Motivasi adalah adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan
11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan

12. Keluwesan adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya yang tujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan

Menurut (Ahadi & Narimani, 2010) efektivitas adalah mengerjakan sesuatu yang benar. Sesuatu organisasi barangkalibisa efisien tetapi tidak efektif dalam pendekatan pencapaian tujuan organisasi. Semakin dekat organisasi ketujuannya, maka semakin efektif organisasi tersebut. (Ahadi & Narimani, 2010)

Menurut (Sutrisno, 2015) Ada tujuh variabel yang mempengaruhi organisasi terhadap Efektivitas yaitu:

1. Struktur
2. Teknologi yaitu perbuatan, pengetahuan, teknis dan peralatan fisik yang digunakan untuk mengubah input menjadi output, barang atau jasa
3. Lingkungan eksternal
4. Lingkungan internal
5. Keterkaitan karyawan pada organisasi
6. Prestasi karyawan
7. Kebijakan manajemen.

Menurut (Steers, 1985) menyatakan bahwa yang terbaik dalam efektivitas ialah memerhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berkaitan : optimalkan tujuan-tujuan, perspektif sistem dan tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi.

Dari tiga konsep diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. dengan ancangan optimalisasi tujuan-tujuan, meskipun tampak sering saling bertentangan, kaitannya dengan optimalisasi tujuan efektifitas itu dinilai menurut ukuran seberapa jauh suatu organisasi berhasil mencapai yang satusama lain saling berkaitan.
2. yang dimaksud dengan ancangan sistem ialah menggunakan sistem terbuka, yaitu pandangan terhadap suatu organisasi yang saling berkaitan dengan berhubungan dengan lingkungannya. sistem mencakup tiga komponen yaitu input, proses, dan output, jadi efektivitas tidak hanya dilihat dari segi tujuan semata-mata, melainkan juga segi sistem.
3. Perilaku manusia dalam organisasi sebagai alatnya atau suatu perusahaan dapat efektif, tetapi juga karena faktor manusianya, yaitu suatu perusahaan tidak efektif.

Menurut (Robbins, Stephen P. dan Coulter, 2010) efektivitas adalah menjalankan aktivitas-aktivitas yang secara langsung membantu organisasi mencapai berbagai sasaran. Efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

### **2.1.2 Sistem Informasi Manajemen**

Sistem informasi manajemen dibentuk oleh tiga kata, yaitu sistem, informasi dan manajemen. Menurut (Susanto, 2013) sistem adalah “kumpulan dari sub bagian/komponen apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu”. Sutarman (Sutarman, 2012) mendefinisikan informasi sebagai “sekumpulan fakta (data) yang diorganisasikan dengan cara tertentu sehingga mereka mempunyai arti bagi si penerima”. Menurut (Nugroho, 2010) manajemen didefinisikan sebagai “suatu tim yang disusun dalam organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh suatu organisasi”. Menurut (Raymond McLeod, 2010) “Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan yang sama dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan”. Menurut (Hartono, 2013) “Sistem Informasi Manajemen adalah sebuah sistem, yaitu rangkaian terorganisasi dari sejumlah bagian atau komponen yang secara bersama-sama berfungsi atau bergerak menghasilkan informasi untuk digunakan dalam manajemen perusahaan”. Menurut (Rochaety, E., Ridwan Z, F., Setyowati, 2013) Sistem Informasi Manajemen merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan sebuah perusahaan”. (Machmud, 2013) Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan suatu sistem yang dapat membantu

manajemen di dalam pengumpulan data, pengolahan serta analisis evaluasi data dan menyajikan ke dalam batas informasi yang bernilai dan akhirnya sampai pada pengambilan keputusan di mana informasi ini berguna untuk mendukung fungsi operasi manajemen.

Menurut (Heidmann et al., 2008) mengatakan bahwa ada lima dimensi atau indikator dari kualitas sistem yaitu : Integrasi (Integration), Fleksibilitas (Flexibility), Aksesibilitas (Accessibility), Formalisasi (Formalization) dan Kekayaan media (Media richness).

Penjelasan lebih lengkap adalah sebagai berikut:

- 1) Integrasi (Integration) Tingkat dimana sistem memfasilitasi kombinasi informasi dari berbagai sumber untuk mendukung keputusan bisnis.
- 2) Fleksibilitas (Flexibility) Kemampuan sistem dalam menyesuaikan terhadap dinamisasi dan perubahan proses bisnis organisasi.
- 3) Aksesibilitas (Accessibility) Kemampuan sistem dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
- 4) Formalisasi (Formalization) Menguraikan aturan tentang bagaimana anggota organisasi berinteraksi antara satu sama lain.
- 5) Kekayaan media (Media richness) Menguraikan saluran tentang bagaimana anggota organisasi saling berinteraksi satu sama lain.

## **Manfaat dan Kualitas Informasi**

### 1. Manfaat Informasi

Informasi dikatakan bernilai apabila dapat memberikan manfaat kepada para penggunanya. Adapun manfaat dari informasi itu sendiri adalah :

- a. Menambah pengetahuan Adanya informasi akan menambah pengetahuan bagi penerima yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
- b. Mengurangi ketidak pastian pemakai informasi Informasi akan mengurangi ketidakpastian karena apa yang akan terjadi dapat diketahui sebelumnya.
- c. Mengurangi risiko kegagalan Adanya informasi dapat mengurangi risiko kegagalan karena apa yang akan terjadi dapat diantisipasi dengan baik, sehingga kemungkinan terjadi kegagalan akan dapat dikurangi dengan pengambilan keputusan yang tepat.
- d. Mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan Informasi akan menghasilkan keputusan yang terarah, sehingga mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan.
- e. Memberikan standar, aturan, ukuran dan keputusan untuk menentukan pencapaian, sasaran berdasarkan informasi yang diperoleh.

### **a. Kualitas Informasi**

Nilai informasi ditentukan oleh banyak hal, di antaranya adalah dengan melihat kualitas informasi yang dihasilkan. Menurut (Mulyanto., 2009) bahwa

mengukur kualitas informasi dapat dilakukan dengan menggunakan tiga macam karakteristik, yaitu :

- a. Akurasi (accuracy) Menurut (Mulyanto., 2009) informasi dikatakan akurasi yaitu informasi harus jelas mencerminkan maksud yang disampaikan dan harus bebas dari kesalahan-kesalahan. Sebuah informasi dapat dikatakan akurat jika informasi tersebut tidak bias atau menyesatkan, bebas dari kesalahan-kesalahan dan harus jelas mencerminkan maksudnya. Ketidakakuratan sebuah informasi dapat terjadi karena sumber informasi atau data mengalami gangguan atau kesengajaan sehingga merusak atau merubah data- data asli tersebut.
- b. Ketepatan waktu (timelines) Menurut (Mulyanto., 2009) informasi yang dihasilkan dari suatu proses pengolahan data, datangnya tidak boleh terlambat (usang). Informasi yang terlambat tidak akan mempunyai nilai yang baik, karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. Kesalahan dalam pengambilan keputusan akan berakibat fatal bagi organisasi.
- c. Relevan (relevance) Menurut (Mulyanto., 2009) Informasi dikatakan berkualitas jika relevan bagi pemakainya. Informasi akan relevan jika memberikan manfaat bagi pemakainya. (Jogiyanto, 2009) mengukur kualitas informasi dengan pengukuran keunikan (uniqueness), ketepatan (conciseness), kejelasan (clarity) dan keterbacaan (read ability).

## **1. Tujuan Sistem Informasi Manajemen Daerah**

Tujuan diterapkannya aplikasi SIMDA adalah :

- a. Sebagai tempat tukar menukar informasi bagi setiap unit kerja sama penerima koneksitas jaringan SIMDA.
- b. Sebagai alat komunikasi langsung dengan menggunakan webcam bagi unit kerja penerima koneksitas jaringan SIMDA
- c. Sebagai salah satu media kontrol bagi realisasi kegiatan, baik capaian fisik maupun penyerapan dananya.
- d. Sebagai media awal bagi pelaksanaan e-governemen.
- e. Sebagai sarana untuk pelaksanaan good government.

## **2. Manfaat Sistem Informasi Manajemen Daerah**

Manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sistem aplikasi SIMDA keuangan daerah terintegrasi adalah sebagai berikut :

- a. Database terpadu, tidak perlu input berulang-ulang data yang sama
- b. Data yang sama akan tercek dan recek secara otomatis (validasi data terjamin)
- c. Fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan dimana:
  - 1. Output dapat disesuaikan menurut perundang-undangan yang berlaku
  - 2. Output dapat disajikan berdasarkan kebutuhan manajemen pemerintah daerah untuk mengambil keputusan/ kebijakan.

## **3. Unsur SIMDA**

Kerangka arsitektur SIMDA terdiri dari empat lapis struktur yaitu :

- a. Akses, jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi, lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik

- b. Portal, pelayanan publik, situs web pemerintah pada internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait
- c. Organisasi pengolahan dan pengelolaan informasi organisasi pendukung yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik
- d. Infrastruktur dan aplikasi dasar semua prasarana, baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi.

#### **4. Kualitas SIMDA**

Kualitas sistem informasi merupakan salah satu faktor dalam pengukuran tingkat kepuasan pengguna sistem informasi. Hal ini dikarenakan keseluruhan siklus akuntansi diproses dengan menggunakan sistem informasi hingga menghasilkan output berupa laporan keuangan. Jika sistem informasi yang digunakan berkualitas maka akan mempengaruhi tingkat kepuasan penggunanya.

Menurut (McGill et al., 2003) dalam Saleh, Darwanis dan Bakar (2012) menyatakan bahwa kualitas yang dihasilkan oleh sistem informasi yaitu :

1. Software akuntansi mampu meningkatkan kapasitas pemrosesan data secara signifikan.
2. Software akuntansi dapat dijalankan pada komputer lain.

3. Software akuntansi dapat digunakan dalam lingkungan organisasi lain tanpa harus banyak dimodifikasi lagi.
4. Software akuntansi memiliki sistem security.
5. Tersedia fasilitas untuk mengoreksi data (fungsi help) pada software akuntansi.
6. Kesalahan (error) yang terjadi mudah dikoreksi dan diidentifikasi.
7. Setiap bagian dari sistem memuat informasi.
8. Software akuntansi mudah digunakan.
9. Software akuntansi tersebut mudah dipelajari.

### **2.1.3 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan**

Program aplikasi komputer SIMDA keuangan adalah suatu program aplikasi yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan aplikasi ini, pemda dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya.

Sejak diterapkannya Aplikasi SIMDA Keuangan, Aplikasi SIMDA Keuangan mengalami tiga tahap perubahan yaitu:

#### **a. Perkembangan SIMDA**

1. SIMDA Ver. 1.0 Aplikasi SIMDA Ver. 1.0 ini merupakan sistem pengelolaan keuangan yang pertama kali dikembangkan oleh BPKP, yaitu pada tahun 2003. Aplikasi ini dikembangkan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam

Negeri (No 19, 2002) mengenai pedoman pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran dan belanja daerah, dan draft sistem akuntansi pemerintah yang sedang tahap pengembangan saat itu. Sistem ini dipakai sampai dengan tahun 2004 dan berhasil Aplikasi SIMDA Ver. 1.0 ini merupakan sistem pengelolaan keuangan yang pertama kali dikembangkan oleh BPKP, yaitu pada tahun 2003.

2. SIMDA Ver. 2.0 Aplikasi SIMDA Ver. 2.0 merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya akibat adanya perubahan dan penambahan acuan peraturan yang mendasarinya, yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri (No 29, 2002), Peraturan Pemerintah (No. 24, 2005) mengenai Standar Akuntansi Pemerintah.
3. SIMDA Ver. 2.1 SIMDA Ver. 2.1 sendiri merupakan sistem informasi versi paling update yang telah berhasil dikembangkan oleh BPKP akibat adanya perubahan acuan peraturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu Peraturan Pemerintah (No.24, 2005), Peraturan Pemerintah (No.8, 2006) mengenai Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (No.13, 2006) mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem ini mulai mulai diaplikasikan sejak tahun 2006 dan sampai sekarang masih digunakan dengan beberapa penyempurnaan.

**b. Output yang dihasilkan**

Output yang dihasilkan dari SIMDA Keuangan adalah :

1. Penganggaran
  - a. Rencana Kerja Anggaran (RKA)
  - b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
  - c. Surat Penyediaan Dana (SPD)
  
2. Penatausahaan
  - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM)
  - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
  - d. Surat Tanda Setoran (STS)
  - e. Register
  - f. Surat pengendalian lainnya.
  
3. Akuntansi dan Pelaporan
  - a. Jurnal
  - b. Buku besar
  - c. Buku pembantu
  - d. Laporan realisasi anggaran
  - e. Laporan arus kas
  - f. Neraca.
  
4. Program Aplikasi SIMDA Keuangan didukung dengan
  - a. Buku manual sistem dan prosedur penganggaran
  - b. Buku manual sistem dan prosedur penatausahaan
  - c. Buku manual sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan

- d. Buku pedoman pengoperasian aplikasi SIMDA Keuangan.

**d. Fungsi Program Aplikasi Simda Keuangan**

Fungsi utama pengimplementasian SIMDA Keuangan adalah :

- a. Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban).
  - a. Menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat
  - b. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya
  - c. Menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan
  - d. Mempermudah proses audit bagi Auditor dengan merubah tata cara audit manual menjadi Electronic Data Processing (EDP) audit.

**e. Keunggulan dan Manfaat SIMDA Keuangan**

1. Output/Laporan disesuaikan peraturan yang berlaku dan fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan
2. Berbasis window
3. Validasi Inputan data lebih terjamin
4. Terdapat menuotoritas dan unit otoritas
5. Memfasilitasi setiap fungsi pengelolaan keuangan daerah dengan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sekaligus melakukan pencatatan akuntansi
6. Memfasilitasi akuntansi pengguna anggaran.

Selain manfaat di bidang pengelolaan keuangan daerah, berikut adalah manfaat lain yang terintegrasi dalam pemanfaatan SIMDA, diantaranya:

1. Sesuai Peraturan Dengan menerapkan aplikasi SIMDA Keuangan sebagai sebuah sistem informasi pengelolaan keuangan, pemerintah daerah secara otomatis telah melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan daerah karena aplikasi SIMDA Keuangan dikembangkan atas dasar kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku
2. Kesiambungan Maintenance Dengan lokasi BPKP yang ada di setiap ibukota provinsi, maka pemeliharaan sistem dapat dilakukan secara berkesinambungan dan optimal.
3. Transfer of Knowledge Poin yang paling penting dari penerapan sistem ini adalah adanya transfer pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan daerah bagi aparat daerah setempat, tidak hanya masalah operasional sistem saja. Selain itu, proses asistensi yang dilaksanakan oleh BPKP dalam kaitannya dengan penerapan aplikasi SIMDA di suatu daerah diorientasikan “satu kali untuk selamanya.”
4. Terintegrasi SIMDA merupakan program aplikasi keuangan daerah yang telah mengintegrasikan empat tahapan penyelenggaraan keuangan daerah yaitu, penganggaran, perubahan anggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. SIMDA juga mengintegrasikan antara proses transaksi keuangan yang terjadi dengan proses penjournalannya secara

otomatis. Sehingga, setiap transaksi keuangan yang terjadi, dapat langsung dilihat jurnal atas transaksi tersebut hingga pelaporannya pada waktu yang bersamaan.

**f. Sumber Daya Manusia**

Dalam proses implementasi SIMDA, dalam kaitannya dengan ketersediaan SDM pendukung program aplikasi tersebut berjalan lancar, diperlukan adanya penyediaan kebutuhan SDM, baik dari pihak BPKP maupun pihak pemerintah daerah sebagai counterpart. BPKP menyediakan satu tim asistensi SIMDA, yang terdiri dari penanggung jawab, pembantu penanggung jawab, pengendali teknis, ketua tim dan beberapa anggota tim (tergantung pada besar kecilnya pemerintah daerah yang ditangani). Sementara pihak pemerintah daerah mengerahkan SDM dengan level yang sama, ditambah tenaga administrator database, asisten administrator dan timnya, serta seluruh pengguna SIMDA (khususnya bendahara) pada level Satker. Khusus untuk administrator database SIMDA, harus memiliki prasyarat antara lain, mahir dalam menggunakan komputer, program database, memahami pentingnya pengamanan data dan antusiasme tinggi untuk mempelajari sistem informasi teknologi. Proses transfer knowledge dilakukan dengan metode yang berbeda bagi masing-masing tipe counterpart. Metode tandem atau pendampingan digunakan untuk mendidik dan melatih administrator database. Metode ini adalah suatu cara mengenali secara dalam dari business process program aplikasi SIMDA Keuangan bagi administrator dengan cara menerima dan melaksanakan instruksi dari personil tim asistensi

yang ditunjuk, dan berdiskusi interaktif jika terdapat permasalahan, khususnya troubleshooting. Metode Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) SIMDA Keuangan merupakan metode penyaluran pengetahuan tentang penggunaan SIMDA Keuangan bagi bendahara dan pengguna dari level Satuan Kerja (Satker). Diklat ini dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu penganggaran, perubahan anggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

#### **2.1.4 Teori Implementasi Kebijakan Simda**

Menurut (Agustino, 2008) Implementasi kebijakan adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Menurut (Carl Van Horn dan Donal Van Meter, 1975), terdapat enam variabel yang memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan, yakni: Pertama, standar dan sasaran kebijakan. Kedua, Sumber daya. Ketiga, hubungan antar organisasi. Keempat, karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi. Kelima, kondisi sosial politik dan ekonomi yang mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan implementasi kebijakan. Keenam, Disposisi implementor. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi SIMDA Keuangan mengacu pada teori yang dikemukakan oleh (EDWARD III, 1980) “implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu komunikasi (Communications), Sumber daya (resource), Sikap (diposition) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure)”. Keempat variabel

tersebut dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat.

Menurut (Salehi et al., 2010) Sistem informasi akuntansi meningkatkan kinerja individu dalam meng-hasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Menurut (Xu, 2003) bahwa kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang buruk dapat memiliki efek buruk pada pengambilan keputusan, misalnya kesalahan dalam informasi mengenai persediaan dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang salah oleh para manajer sehingga kelebihan persediaan atau di persediaan yang memiliki dampak yang parah pada profitabilitas perusahaan dan kepuasan pelanggan. Kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat dievaluasi dengan empat atribut Akurasi, ketepatan waktu, kelengkapan dan konsis-tensi, sejalan dengan (Raymond McLeod, 2010) menyatakan bahwa Kualitas informasi diukur dengan empat dimensi yaitu relevansi, akurasi, ketepatan waktu dan kelengkapan.

### **2.1.5 Pengelolaan Keuangan Daerah**

Keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan Negara. Oleh karena itu, dengan merujuk pada pengertian Keuangan Negara dalam (UUD no.17 Tahun 2003), maka pengertian Keuangan Daerah dapat didefinisikan yaitu Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam peraturan Menteri Dalam

Negeri (No.13, 2006), pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. pelaksanaan otonomi daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk mengola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisiensi, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah adalah cara pengelolaan keuangan daerah secara berdaya guna dan berhasilguna. Hal tersebut diharapkan agar sesuai dengan aspirasi pembangunan dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang akhir-akhir ini. Dilihat dari aspek masyarakat dengan adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik maka dapat meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintah yang baik, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif terutama dalam menyediakan layanan prima bagi seluruh masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 pasal 1 ayat 6 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penetausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

#### **a. Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri (No.13, 2006) tujuan dari pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangan kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah, lembaga atau orang itu termasuk pemerintah pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum.
2. Mampu Memenuhi Kewajiban Keuangan Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.
3. Kejujuran Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat dipercaya.
4. Hasil guna (Effectiveness) dan daya guna (efficiency) Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya
5. Pengendalian Para aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

**b. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah**

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah diperlukan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada pada pemerintahan daerah. Dari sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, pimpinan SKPD dapat memonitor sudah sejauh mana suatu program atau kegiatan telah terlaksana, sudah seberapa besar penyerapan dana atas program atau kegiatan yang telah dilakukan sehingga dapat dinilai apakah program atau kegiatan yang dilakukan sudah ekonomis, efisien dan efektif.

Hasil akhir dari sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dapat berupa formulir-formulir yang dibutuhkan para pengelola keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) antara lain laporan berkala maupun laporan tahunan. Pemerintah daerah memerlukan sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah. Sistem tersebut harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (No.13, 2006) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (No.29, 2002). Atas dasar tersebut di atas pemerintah daerah mengembangkan sebuah sistem informasi keuangan yang memiliki kekuatan fitur bukan hanya dari sisi kelengkapan fungsionalitasnya saja, namun juga memiliki kekuatan dalam hal proses integrasi dengan

sistem-sistem lainnya yang terkait. Berdasarkan Modul Aplikasi dari Departemen Dalam Negeri, Pengertian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yaitu : aplikasi SIPKD merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses-proses yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah pada tingkat SKPD.

fungsi aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :

1. Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan data keuangan daerah (Penganggaran, Perencanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban).
2. Menyusun Laporan Keuangan lebih efisien dan akurat.
3. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya.
4. Menyajikan informasi yang akurat.

Sistem Informasi Keuangan Daerah dapat didefinisikan sebagai Sistem Informasi Keuangan Daerah merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (Ahmad, 2002)

## 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul, Nama Jurnal, Hal, Vol	Hasil Peneliti
1	Annafia Utami, Yeni Priatna Sari	Analisis Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)–Barang Milik Daerah (BMD) pada	bahwa efektivitas penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) – Barang Milik Daerah

		DPPKAD Kabupaten Pemalang, Jurnal MONEX Vo 1.6 No 1 Januari 2017	(BMD) pada DPPKAD Kabupaten Pemalang memperoleh nilai rata-rata variabel sebesar 3,2 yang berada pada nilai interval 2,45 –3,2 yang berarti dapat dikatakan Efektif.
2	Ritno H Rondonuwu, Jantje, Tinangon, Novi Budiarto	ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA, Jurnal EMBA 23Vol.3No.4 Desember2015, Hal. 23-32	<p>1.Kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah telah berjalan dengan baik, ditunjukkan dengan tingginya rata-rata rasio efektivitas selama tahun 2010 sampai 2014.</p> <p>2.Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai setiap program dan kegiatan masih perlu ditingkatkan, mengingat 3.Dalam hal kestabilan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam kurun waktu lima tahun, didapati tingkat efektivitas yang dikategorikan sangat efektif didapati terjadi ketidakstabilan atau tidak konsisten tingkat efektivitas di tiap tahunnya. Sedangkan dalam hal tingkat efisiensi yang di kategorikan kurang efisien di dapati hampir stabil dan konsisten.</p>

3	Nur Laila Yuliani	Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Jurnal manajemen&bisnis, Vol.5 No.2 September 2014	faktor atau variabel yang berpengaruh positif dan secara statistik signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah adalah variabel sistem informasi pengelolaan keuangan dan penerapan anggaran berbasis kinerja
4	Vivid Annisa	PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, DAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH, JOM Fekon, Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017	<p>1)Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengaruh yang ditunjukkan adalah positif, artinya semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah maka kinerja dari pemerintah daerah juga akan ikut meningkat.</p> <p>2)Pengelolaan Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengaruh yang ditunjukkan adalah positif, artinya semakin baik pengelolaan keuangan daerah maka kinerja dari pemerintah daerah juga akan ikut meningkat.</p> <p>3)Good Governance secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengaruh yang ditunjukkan adalah positif, artinya semakin baik good governance maka kinerja dari</p>

			pemerintah daerah juga akan ikut meningkat.
5	Maulana Yusup	PENGARUH SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN, Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship, Vol. 10, No. 2, Oktober 2016, 149-160ISSN 2443-0633	bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah diterapkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Sistem ini berbasis jaringan komputer yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat mampu menghubungkan dan mampu menangani konsolidasi data, sehingga data di Pemerintah Daerah dapat terintegrasi dengan baik. Sistem ini mempermudah mendapatkan informasi dan sudah berjalan dengan baik.
6	Trivena Anastasia Rahantoknam, Jantje J. Tinangon, Lidya M. Mawikere	ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern12(2), 2017, 754-761	Penerapan SIMDA Keuangan pada BKAD Kabupaten Maluku Tenggara telah memiliki beberapa faktor pendukung dalam penerapannya yaitu komunikasi aktif yang telah dilakukan oleh semua pihak yang terkait dengan penerapan SIMDA Keuangan, adanya sikap implementor yang menerima/setuju atas pelaksanaan penerapan SIMDA Keuangan serta dukungan dari kepala

			<p>kantor/pemimpin, dan Struktur birokrasi yang berperan dalam pengawasan atas jalannya sistem aplikasi komputerisasi SIMDA Keuangan tetapi masih terdapat beberapa faktor pendukung yang belum terpenuhi yaitu Sumber Daya Manusia. Secara kualitas pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara telah memahami tujuan dari penerapan SIMDA Keuangan namun secara kuantitas masih terdapat SDM yang tidak paham dalam penerapan SIMDA Keuangan.</p>
7	Edi Yanto, Akfir	<p>ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH (SIMDA KEUANGAN), Indonesian Journal Of Strategic Management p-ISSN 2614-5391, Vol 3, Issue1, february 2019</p>	<p>Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli, terdapat perbedaan kualitas informasi yang dihasilkan antara sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan. Kualitas informasi yang dihasilkan saat sesudah/ setelah menggunakan aplikasi tersebut lebih relevan, akurat dan tepat waktu.</p>
8	Rini Handayani	<p>Analisis Faktor-Faktor yang Menentukan Fektivitas Sistem Informasi pada Organisasi Sektor Publik, JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN, VOL.</p>	<p>Hasil pengujian regresi berganda berhasil mendukung tiga dari lima hipotesis yang diajukan yaitu manajemen puncak, manajemen SI dan</p>

		12, NO. 1, MEI 2010: 26-40	penggunaan SI berpengaruh positif terhadap efektivitas SI sedangkan kepuasan pengguna dan budaya organisasi tidak berpengaruh positif terhadap efektivitas SI.
<b>9</b>	Ni Putu Yogi Merta Maeka Sari, Made Pradana Adiputra, Edy Sujana	PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN, PEMERINTAH DAERAH, e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Volume 2 No. 1 Tahun 2014	1) secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana, 2) secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana, dan 3) secara simultan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
<b>10</b>	MOHAMMAD ALFIAN	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Simda dan Kualitas Laporan Keuangan SKPD, Jurnal Akuntansi, VOL. 16 NO.1	bahwa dukungan manajemen puncak, kualitas data dan tingkat pemahaman pengguna secara bersama-sama

		JANUARI 2015	mempengaruhi implementasi SIMDA sebesar 90,2persen, hal tersebut berarti bahwa 9,8 persen terdapat variabel atau faktor lain yang mempengaruhi implementasi SIMDA. Dukungan manajemen puncak, kualitas data, tingkat pemahaman pengguna dan implementasi SIMDA secara bersama-sama mempengaruhi kualitas laporan keuangan sebesar 79,3 persen, sehinggamasih ada 20,7 persen variabel atau faktor lain yangmemeperngaruhi Kualitas Laporan Keuangan yangdihasilkan oleh SKPD yang ada di kota Yogyakarta.
<b>11</b>	Putri Dwi Febria	EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI SIMDA KEUANGAN DI KANTOR SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH DATAR, Jurnal ilmu administrasi public, Vol. 1 No. 1 Tahun 2018	Penerapan aplikasi SIMDA keuangan sudah terlaksana dengan baik, namun dalam penerapannya masih terdapat berbagai kendala yang sangat berpengaruh dalam proses pelaksanaan sehingga masih belum cukup untuk dikatakan efektif. Sesuai dengan teori pengukuran efektivitas menurut Campbell yang digunakan dalam penelitian ini bahwa keberhasilan program, keberhasilan sasaran dan pencapaian tujuan melalui penerapan

			<p>SIMDA sudah dapat dirasakan oleh semua pihak. Namun untuk kepuasan pengguna masih belum maksimal karena masih ada keluhan dari pegawai saat mengoperasikan SIMDA, juga masih banyak pegawai yang tidak bisa mengoperasikan SIMDA. Untuk mengatasi masalah tersebut hendaknya dilakukan pelatihan dan peningkatan kualitas pengguna agar aplikasi SIMDA dapat dimanfaatkan dengan optimal.</p>
12	Dastrianti Syarifuddin	<p>ANALISIS IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) DI PEMERINTAH KABUPATEN SARMI, Jurnal Kajian Ekonomi &amp; Keuangan Daerah, Volume 5, Nomor 2, September 2020 : 174-198</p>	<p>Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel tingkat pemahaman pengguna, dukungan manajemen puncak dan kualitas data berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap implementasi system informasi manajemen daerah (SIMDA) di Kabupaten Sarmi.</p>
13	Andini Kusuma Dewi	<p>PENGARUH KUALITAS SISTEM INFORMASI APLIKASI SIMDA (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH) TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA AKHIR,</p>	<p>hasil Uji F menunjukkan bahwa Kualitas Sistem Informasi Aplikasi SIMDA berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pengguna Akhir, berdasarkan nilai (<math>F_{hitung} &gt; F_{tabel}</math>) yaitu</p>

			33.186 > 3,94 dan berdasarkan nilai signifikan ( $0,000 < 0,05$ ), yang berarti bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.
--	--	--	---

### 2.3 Kerangka Konseptual

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dipimpin oleh kepala dinas dan kedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.

Untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik pada umumnya, BPKAD Provinsi Sumatera Utara menerapkan aplikasi simda untuk kemajuan laporan keuangan organisasi, Jika kepuasan suatu organisasi dapat terpenuhi maka pegawai akan dapat berprestasi dan dapat bekerja dengan efektif sesuai yang diharapkan oleh BPKAD Provinsi Sumatera Utara.

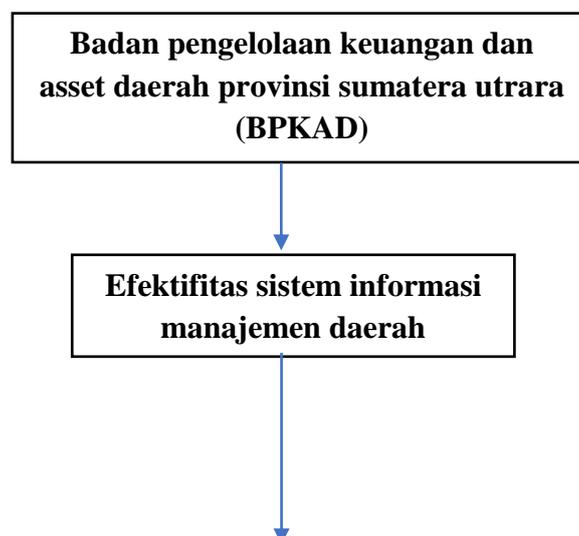
Keefektifitasan sistem informasi manajemen daerah sangat penting bagi pegawai BPKAD provsu untuk menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif. Keefektifitasan sistem dapat dilihat dari kualitas sistem tersebut. Menurut (Heidmann et al., 2008) mengatakan bahwa ada lima dimensi atau indikator dari kualitas sistem yaitu : Integrasi (Integration), Fleksibilitas (Flexibility), Aksesibilitas (Accessibility), Formalisasi (Formalization) dan Kekayaan media (Media richness).

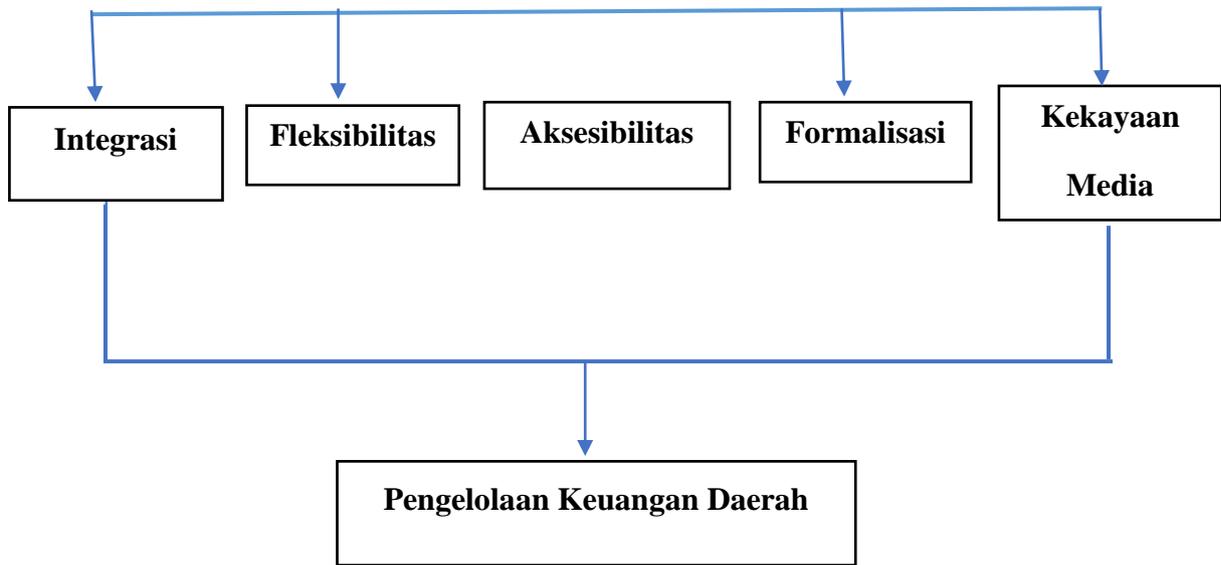
pengelolaan keuangan daerah yang baik digunakan untuk mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sesuai dengan pengertian Keuangan Negara dalam UU No. 17 Tahun 2003, maka pengertian Keuangan Daerah yaitu Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

maka dapat digambarkan secara sederhana kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

**Gambar 2.1**

**Kerangka Konseptual**





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ini digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk Pengelolaan Keuangan pada provinsi Sumatera Utara berjalan dengan efektif.

#### **3.2 Definisi Operasional**

##### **3.2.1 Efektifitas Simda**

Dalam rangka melaksanakan pertanggungjawaban keuangan, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memanfaatkan teknologi informasi agar dapat mempermudah proses penyusunan laporan dan data keuangannya. Atas dasar inilah BPKP kemudian mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Penerapan simda Keuangan harus memenuhi beberapa kriteria sehingga dikatakan efektif.

Efektivitas penerapan sistem informasi merupakan hasil yang di peroleh dari suatu instansi mencerminkan sejauh mana instansi tersebut mampu menghasilkan laporan keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat dan dapat diandalkan. dan efektifitas sistem tersebut adalah faktor penting dari suatu sistem informasi yang dapat mencerminkan sistem pemrosesan informasi sehingga dapat menghasilkan informasi yang efektif. Menurut (Heidmann et al., 2008) mengatakan bahwa ada lima dimensi atau indikator dari efektifitas

kualitas sistem yaitu : Integrasi (Integration), Fleksibilitas (Flexibility), Aksesibilitas (Accessibility), Formalisasi (Formalization) dan Kekayaan media (Media richness).

### **3.2.2 Pengelolaan Keuangan daerah**

pengelolaan keuangan daerah adalah keinginan untuk mengelola keuangan daerah serta tertib, taat pada peraturan perundang-undang, efisien, ekonomis, efektif, transparansi, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

peraturan Menteri Dalam Negeri (No.13, 2006), pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan yang efektif merupakan pengelolaan keuangan daerah yang menekankan pada pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

## **3.3 Tempat dan Waktu Penelitian**

### **3.3.1 Tempat Penelitian**

Tempat Penelitian ini adalah di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPKAD) Jalan Imam Bonjol No. 18 Gedung Bank Sumut Lt. 7 Medan.

### 3.3.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan di mulai dari bulan April 2021 sampai dengan selesai, dapat dilihat

**Tabel 3.1**  
**Rencana Jadwal Penelitian**

Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian																			
	Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul		■																		
Penyusunan Proposal					■	■	■	■												
Seminar Proposal											■									
Penyusunan Instrumen											■	■								
Pengumpulan Data											■	■								
Penulisan Skripsi													■	■						
Bimbingan Skripsi													■	■	■	■				
Sidang Meja Hijau																	■	■		

### 3.4 Jenis Dan Sumber Data

#### 3.4.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang penulis kumpulkan untuk mendukung variabel yang diteliti adalah data kualitatif, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian berupa penjelasan pernyataan.

### 3.4.2 Sumber Data

#### 1. Data Primer

yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada pegawai atau staff pengelola keuangan yang menggunakan aplikasi SIMDA.

#### 2. Data Sekunder

yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aplikasi SIMDA.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

#### 3.5.1 Penelitian Lapangan (field Research)

Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di perusahaan yang menjadi objek penelitian. Data yang diperoleh merupakan data primer yang diperoleh dengan secara:

1. Wawancara, merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya di ajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk di jawab ”

**Tabel 3.2**

**Jumlah Pertanyaan Berdasarkan Indikator Efektifitas Sistem Informasi Manajemen daerah**

No.	Indikator	Jumlah
1	Integrasi	2
2	Fleksibilitas	2
3	Aksesibilitas	2

<b>4</b>	<b>Formalisasi</b>	<b>1</b>
<b>5</b>	<b>Media</b>	<b>1</b>

Tabel 3.3

**Jumlah Pertanyaan Berdasarkan Indikator Pengelolaan Keuangan daerah**

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Pertanggung jawaban</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>Pengawasan</b>	<b>1</b>

2. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan dengan fenomena lain.

### 3.6 Teknik Analisis Data

analisis data dalam penelitian kualitatif sebenarnya dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dari lapangan. Namun dalam kenyataanya, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Adapun tahapan-tahapan analisi data dalam penelitian ini sesuai dengan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyino (2010). Yaitu sebagai berikut :

1. Pengumpulan data, yaitu peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan.
2. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
3. Sajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tidakan.
4. Kesimpulan data (verifikasi data ), berarti bahwa data yang telah disimpulkan masih harus diverifikasi selama penelitian berlangsung.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian**

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara yang merupakan gabungan dari Biro Keuangan Sekterariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Biro Perlengkapan Aset yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertugas merumuskan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah, melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pengelolaan keuangan dan aset daerah, melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) serta pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintah. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- 1) Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah dibidang perbendaharaan, anggaran, kas daerah dan pengelolaan aset.
- 2) Penyelenggaraan pengolahan bahan/ data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan pengelolaan aset.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

- 4) Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**A. Visi Dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.**

Adapun visi dan misi dari badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) provinsi sumatera utara adalah sebagai berikut:

**1) Visi BPKAD Provsu**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisi cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu.

Selaras dengan itu, maka visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu adalah :

**“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Professional, Akuntabel dan Transparan, Berbasis Teknologi Informasi serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.**

## 2) Misi BPKAD Provsu

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik. Dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program-program serta hasil yang hendak dicapai waktu yang akan datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut.

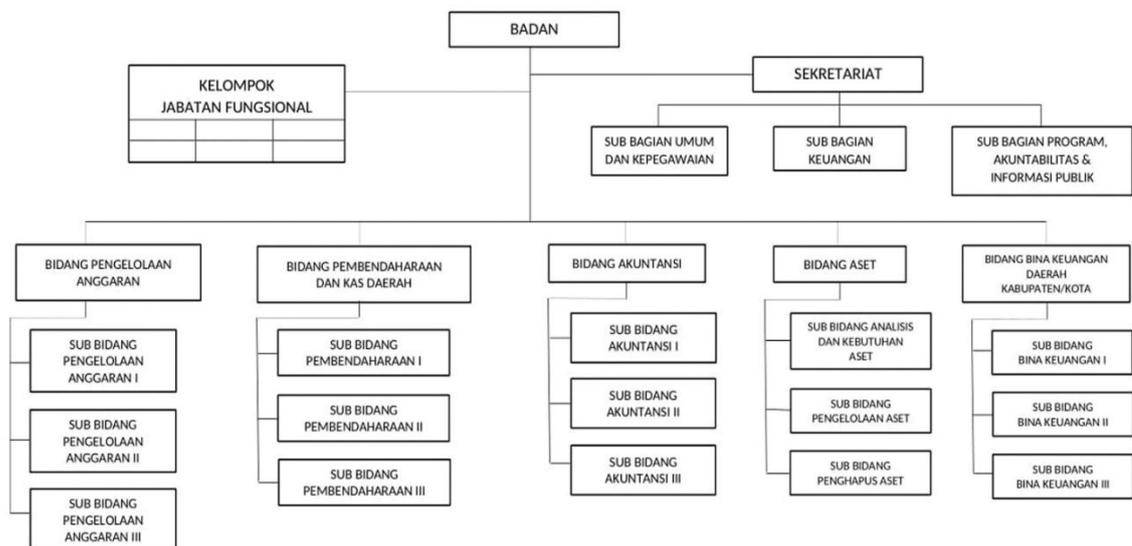
Untuk merealisasikan visi dan memberikan kebijakan tentang tujuan yang akan diwujudkan, serta untuk memberikan focus terhadap program yang akan dilaksanakan serta memantapkan etos kerja, maka misi Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provsu adalah :

1. Meningkatkan kemampuan profesionalisme disiplin aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, disiplin anggaran, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. Mewujudkan system pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi.

## B. Struktur Organisasi dan deskripsi tugas BPKAD Provsu

BAGAN ORGANISASI BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH PROVSU

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TANGGAL 12 MARET 2018



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

tti

TENGGU ERRY NURADI

Sumber : BPKAD SUMATERA UTARA (12 DESEMBER 2020)

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKAD PROVSU**

Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah, melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pengelolaan keuangan dan aset daerah, melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) serta pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi, yaitu:

1. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang perbendaharaan, anggaran, kas daerah dan pengelolaan aset.
2. Penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan pengelolaan aset.
1. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai uraian tugas, yaitu:
  1. Menyelenggarakan rumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan Kepala Daerah.

2. Menyelenggarakan dan menetapkan program kerja dan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
3. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
4. Menyelenggarakan dan mengesahkan
  - DPA
  - SKPD/DPPA
  - SKPD.
5. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan APBD.
6. Menyelenggarakan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
7. Menyelenggarakan penetapan SPD.
8. Menyelenggarakan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
9. Menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
10. Menyelenggarakan penyajian informasi keuangan daerah.
11. Menyelenggarakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
12. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan pembinaan di bidang pengelolaan
13. keuangan dan aset daerah dengan unit kerja agar kegiatan tersebut dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras.
14. Menyelenggarakan kegiatan

- kegiatan pada badan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi agar program
- program dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk menyelenggarakan tugas, fungsi dan uraian tugas, Kepala Badan melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

- 1) Sekretaris
- 2) Bidang Pengelolaan Anggaran
- 3) Bidang Perbendaharaan Dan Kas Daerah
- 4) Bidang Akuntansi
- 5) Bidang Aset
- 6) Unit Pelayanan Teknis Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Tidak Bergerak
- 7) Unit Penyuluhan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Wilayah I
- 8) Unit Penyuluhan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Wilayah II

#### **4.2 Deskripsi Data**

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri (No.13, 2006), pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah.

Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk mengola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisiensi, efektif, dan

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. dengan adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik maka dapat meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintah yang baik, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk bekerja secara lebih efektif .

Untuk Mengelola keuangan daerah yang efektif BPKAD Provsu menggunakan aplikasi SIMDA. Dengan aplikasi ini, pemda dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi.

#### **4.2.1 Efektifitas SIMDA**

Efektifitas merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program atau kegiatan untuk mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan oleh organisasi . Efektifitas sistem adalah faktor penting dari suatu sistem informasi yang dapat mencerminkan sistem pemrosesan informasi sehingga dapat menghasilkan informasi yang efektif.

Keefektifitasan sistem dapat dilihat dari kualitas sistemnya. Kualitas sistem informasi merupakan salah satu faktor dalam pengukuran tingkat kepuasan pengguna simda. Hal ini dikarenakan keseluruhan siklus akuntansi diproses dengan menggunakan simda hingga menghasilkan output berupa laporan keuangan. Jika simda yang digunakan berkualitas maka akan menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif.

#### 4.2.1.1 Integrasi

Menurut (Heidmann et al., 2008) Integrasi merupakan tingkat dimana sistem memfasilitasi kombinasi informasi dari berbagai sumber untuk mendukung keputusan bisnis. Sistem integrasi (integrated system) merupakan sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan software aplikasi, baik secara fisik maupun secara fungsional. Sistem terintegrasi akan menggabungkan komponen sub-sub sistem ke dalam satu sistem dan menjamin fungsi-fungsi dari sub sistem tersebut sebagai satu kesatuan sistem.

**Tabel 4.1**

**Indikator kesesuaian Efektifitas simda integrasi Menurut (Heidmann et al., 2008)**

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan ( S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
1. keberhasilan dan keamanan data didalam aplikasi simda lebih terjaga,.	Simda diBPKAD provsu masih bersifat internal sehingga keberhasilan dan keamanan data didalam aplikasi simda lebih terjaga,.	TS

#### 4.2.1.2 Fleksibilitas

Menurut (Heidmann et al., 2008) Fleksibilitas (Flexibility) fleksibilitas sistem informasi merupakan kemampuan sistem dalam menyesuaikan terhadap dinamisasi dan perubahan proses bisnis organisasi. fleksibilitas dapat dipandang dari berbagai sisi atau aspek.

Tabel 4.2

**Indikator Kesesuaian Efektifitas simda fleksibilitas Menurut (Heidmann et al., 2008)**

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan ( S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
1. Simda diBPKAD Provsu dapat digunakan pada instansi lain	simda diBPKAD tidak dapat digunakan untuk instansi lain dan simda hanya difokuskan untuk keperluan manajemen keuangan	TS

**4.2.1.3 Aksesibilitas**

Menurut (Heidmann et al., 2008) Aksesibilitas merupakan kemampuan sistem dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana produk, perangkat, layanan, atau lingkungan yang tersedia untuk orang sebanyak mungkin. Aksesibilitas dapat dilihat sebagai "kemampuan untuk mengakses" dan manfaat yang mungkin dari beberapa sistem atau entitas.

Tabel 4.3

**Indikator Kesesuaian Efektifitas simda Aksesibilitas Menurut (Heidmann et al., 2008)**

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan ( S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
1. Proses pelaksanaan kerja simda dimulai dari tahap penginputan sampai menghasilkan output	Adapun Input dalam proses pengelolaan keuangan menggunakan SIMDA yaitu berupa jurnal (input) yang menjadi dasar pembuatan laporan keuangan dan adapun (output) yang dihasilkan yaitu berupa RKA (rencana kerja anggaran), DPA (dokumen pelaksanaan anggaran), SPD (surat penyedia dana). Data ini	S

	diolah secara otomatis oleh sistem, pekerjaan jadi mudah karena hanya menginput data yang menjadi dasar pengolahan output yang diinginkan.	
2.cara kerja simda dapat memberikan jaminan yang efektif untuk pengelolaan keuangan bagi pegawai BPKAD provsu	kemampuan simda sejauh ini dapat mempermudah tercapainya tujuan yang efektif dalam mengelola keuangan daerah	S

#### 4.2.1.4 Formalisasi

Menurut (Heidmann et al., 2008) Formalisasi merupakan uraian aturan tentang bagaimana anggota organisasi berinteraksi antara satu sama lain. Formalisasi menunjukkan tingginya standardisasi atau pembakuan tugas-tugas maupun jabatan dalam suatu organisasi. Semakin tinggi derajat formalisasi maka semakin teratur perilaku bawahan dalam suatu organisasi.

Formalisasi bisa dicapai melalui pengaturan yang bersifat on the job dimana organisasi akan menggunakan lebih banyak peraturan maupun prosedur untuk mengatur kegiatan karyawan.

**Tabel 4.4**

**Indikator Kesesuaian Efektifitas simda Formalisasi Menurut (Heidmann et al., 2008)**

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan ( S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
1. Pimpinan melakukan koordinasi kepada pegawai/staff BPKAD Provsu	pimpinan sudah melakukan koordinasi kepada pegawai/staff setiap sebulan sekali	S

#### 4.2.1.5 Media

Menurut (Heidmann et al., 2008) Kekayaan media merupakan uraian saluran tentang bagaimana anggota organisasi saling berinteraksi satu sama lain. Teori ini menempatkan semua media pada skala yang berkelanjutan berdasarkan kemampuan mereka untuk mengkomunikasikan pesan yang kompleks, bagi media yang dapat mengatasi perbedaan dengan efektif dan dapat mengklarifikasi masalah-masalah yang ambigu dianggap lebih sempurna dibandingkan dengan media komunikasi yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dapat menyampaikan pemahaman.

**Tabel 4.5**

**Indikator Kesesuaian Efektifitas simda Media Menurut (Heidmann et al., 2008)**

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan ( S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
1. Simda dapat mengolah informasi secara tepat waktu	informasi untuk mengolah keuangan dapat didapatkan pegawai/staff melalui simda secara tepat waktu	S

#### 4.2.2 Pengelolaan Keuangan Daerah Menggunakan Simda

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri (No.13, 2006), pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. pelaksanaan otonomi daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk mengola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisiensi, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

**Tabel 4.6**  
**Indikator Kesesuaian Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut**  
**Pemendagri No.13 thn 2006**

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan ( S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
1. BPKAD provsu menerapkan simda untuk mengelola keuangannya	Simda merupakan aplikasi yang diterapkan BPKAD untuk mengelola keuangan yang efektif	S
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan laporan keuangan melalui simda pada BPKAD sudah efektif	BPKAD megelola keuangannya meurut informasi yang ada didalam aplikasi simda sehingga dapat selesai dengan target waktu.	S
3. Informasi yang dibutuhkan BPKAD tersedia Ketika diminta	Dengan menggunakan simda para pegawai jadi mudah mendapatkan informasi mengenai mengelola keuangan sesuai waktu yang diminta.	S
4. Pengawasan terhadap laporan keuangan BPKAD dilakukan oleh BPKP	Laporan keuangan BPKAD dilakukan pengawasan oleh BPKP	S

### 4.3 Pembahasan

#### 4.3.1 Analisis Efektifitas Simda

Efektifitas penerapan sistem informasi merupakan hasil yang di peroleh dari suatu instansi mencerminkan sejauh mana instansi tersebut mampu menghasilkan laporan keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat dan dapat diandalkan. dan efektifitas sistem tersebut adalah faktor penting dari

suatu sistem informasi yang dapat mencerminkan sistem pemrosesan informasi sehingga dapat menghasilkan informasi yang efektif.

Pada BPKAD Provsu menerapkan aplikasi simda dalam mengelola keuangannya. Kebijakan penerapan simda pada BPKAD Provsu dilakukan untuk mengelola proses yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah, dimulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Sesuai dengan pengertian sistem informasi Menurut (Raymond McLeod, 2010) "Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan yang sama dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan".

Berdasarkan hasil Wawancara yang penulis lakukan pada staff BPKAD provsu bahwa dengan adanya dilakukan koordinasi rutin dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan simda maka simda yang diterapkan diBPKAD Provsu sudah cukup efektif dan dapat menghasilkan kemampuan pengoperasian komputer, kemampuan dalam Menyusun dan merealisasikan data keuangan daerah, rutinitas komunikasi antar pengguna, sehingga infrastruktur yang memadai.

Program simda yang diterapkan dalam BPKAD Provsu merupakan program yang kompleks dalam pengelolaan keuangan, sejauh ini sudah cukup efektif untuk mengelola keuangan daerah. namun, eror kecil sudah pernah terjadi dalam mengelola keuangan seperti ada data yang tidak terekam, tidak

terkoneksi ke database simda. Yang disebabkan karena simda masih bersifat internal, operator yang menggunakan simda masih kurang paham menggunakan simda. Oleh karena itu BPKAD provsu Menyusun prosedur simda seperti :

1. Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan
2. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan
3. Menguji coba sarana dan prasana yang disiapkan
4. Implementasi terhadap sarana dan prasarana

#### **4.3.1.1 Integrasi**

Sesuai dengan pengertian integrasi simda menurut (Heidmann et al., 2008) maka pengintegrasian sistem informasi merupakan salah satu konsep kunci dari sistem Informasi Manajemen. Berbagai sistem dapat saling berhubungan satu dengan yang lain dengan berbagai cara yang sesuai dengan kebutuhannya. Aliran informasi diantara sistem sangat bermanfaat bila data dalam file suatu sistem diperlukan juga oleh sistem yang lainnya, atau output suatu sistem menjadi input bagi sistem lainnya. Secara manual juga dapat dicapai suatu integrasi tertentu, misalnya data dari satu bagian dibawa ke bagian lain, dan oleh petugas administrasi data tersebut digabung dengan data dari sistem yang lain. Jadi kalau secara manual maka derajat integrasinya menjadi tinggi.

Keuntungan dari integrasi sistem ini adalah membaiknya suatu arus informasi dalam sebuah organisasi. Suatu pelaporan biasanya memang memerlukan waktu, namun demikian akan semakin banyak informasi yang relevan dalam kegiatan manajerial yang dapat diperoleh bila diperlukan.

Keuntungan ini merupakan alasan yang kuat untuk mengutamakan (mengunggulkan) sistem informasi terintegrasi karena tujuan utama dari sistem informasi adalah memberikan informasi yang benar pada saat yang tepat. Keuntungan lain dari pengintegrasian sistem adalah sifatnya yang mendorong manajer untuk membagikan (mengkomunikasikan) informasi yang dihasilkan oleh departemen (bagian) nya agar secara rutin mengalir ke system lain yang memerlukannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis bahwa Integrasi simda dapat diukur dengan keberhasilan dan keamanan data didalam aplikasi simda lebih terjaga,. simda sendiri sistemnya sudah terintegrasi namun belum terintegrasi dengan aplikasi lain disebabkan karena aplikasi tersebut masih bersifat internal.

Simda pada BPKAD Provsu cuma bisa diakses dari satu komputer kekomputer lain dalam satu jaringan yang sama dan masih berbasis aplikasi desktop.

DESKTOP BASED adalah aplikasi berbasis desktop yang berjalan di satu atau beberapa komputer (terhubung dalam satu jaringan) secara independen dan tidak memerlukan browser. database simda, software simda berbasis desktop dengan menggunakan jaringan Local Area Network yang dimana hanya kalangan internal pemerintah daerah saja yang dapat mengakses simda, sehingga backup database untuk simda pun juga hanya bersifat internal .

untuk mengatasinya, koordinasi yang baik perlu dilakukan antar pihak. Koordinasi, dalam hal ini berupa kesepahaman dan kesamaan prosedur kerja

yang terstandar antar pihak. Bukan berkaitan dengan sistem. pihak BPKAD selaku operator simda harus memaksimalkan koordinasi-koordinasi dengan perusahaan yang ada proses pencatatan tidak bermasalah. Koordinasi antar pihak yang baik diperlukan sehingga proses feedback dan respon perbaikan akan selalu terjangkau dengan baik dan cepat (Hertanto, Domai dan Amin, 2016).

#### **4.3.1.2 Fleksibilitas**

Fleksibilitas dapat mempengaruhi efisiensi dan efektifitas operasional bagi sistem informasi di perusahaan, akan tetapi faktor fleksibilitas ini jarang sekali menjadi faktor yang dipertimbangkan secara eksplisit dalam perancangan dan implementasi sistem informasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis bahwa simda sendiri sudah cukup fleksibel diterapkan pada BPKAD provsu untuk pengelolaan keuangan namun masih kurang disebabkan karena simda tidak dapat digunakan untuk instansi lain dan simda hanya difokuskan untuk keperluan manajemen keuangan sehingga seluruh perbaikan sistem aplikasi hanya bisa menunggu respon dari pengembang program SIMDA.

Menurut (Ramadhan 2013) menekankan bahwa hal ini terjadi karena pimpinan belum secara pro aktif dalam meminta informasi dan dalam mendukung proses pengembangan sistem untuk menghasilkan informasi laporan yang berkualitas. Komitmen atasan untuk pengembangan sistem yang ada berkaitan dengan visi atasan dalam menciptakan proses pengelolaan keuangan yang baik. Pengelolaan keuangan yang baik, dalam hal ini yaitu

sistemnya efektif serta menghasilkan output yakni pelaporan keuangan yang akurat dan akuntabel. Dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan, tentunya harus ada anggaran yang memadai serta SDM yang bisa mengoperasikan dengan baik dan diadakannya pelatihan dan pengembangan operator sistem tersebut. Penganggaran dan evaluasi serta program-program pengembangan sistem tentunya disahkan dan dicetuskan oleh pimpinan

salah satu solusi yaitu menyuarakan keluhan-keluhan dan saran pengembangan dalam rapat atau diskusi langsung dengan atasan. Perubahan yang ditekankan yaitu evaluasi sistem yang ada dan pengadaan pembaharuan sistem demi terwujudnya proses pencatatan yang lancar. Pengelolaan keuangan harus mendapat komitmen yang tinggi dari pimpinan.

#### **4.3.1.3 Aksesibilitas**

Sesuai pengertian Aksesibilitas Menurut (Heidmann et al., 2008) maka aksesibilitas dapat dilihat sebagai "kemampuan untuk mengakses" dan manfaat yang mungkin dari beberapa sistem atau entitas. Aksesibilitas tidak boleh disamakan dengan kegunaan yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana suatu produk (misalnya, perangkat, layanan, lingkungan) dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai target yang ditetapkan dengan efektivitas, efisiensi dan kepuasan dalam konteks tertentu penggunaan .

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis bahwa simda dapat memudahkan staff pemda dalam mengelola keuangan lebih cepat dalam penyusunannya. untuk menggambarkan proses pelaksanaan kemampuan SIMDA untuk pengelolaan keuangan terkait mengenai proses penginputan data

sampai dengan menghasilkan sebuah output.

Adapun Input dalam proses pengelolaan keuangan menggunakan SIMDA Keuangan yaitu berupa jurnal (input) yang menjadi dasar pembuatan laporan keuangan dan adapun (output) yang dihasilkan yaitu berupa RKA (rencana kerja anggaran), DPA (dokumen pelaksanaan anggaran), SPD (surat penyedia dana). Data ini diolah secara otomatis oleh sistem, pekerjaan jadi mudah karena hanya menginput data yang menjadi dasar pengolahan output yang diinginkan.

Staff BPKAD juga mengatakan bahwa kemampuan simda sejauh ini dapat mempermudah tercapainya tujuan yang efektif dalam mengelola keuangan daerah karena simda merupakan aplikasi dari pemerintah yaitu badan pengawasan dan pengemabangunan dengan jaminan narasumber yang koorporatif.

#### **4.3.1.4 Formalisasi**

Sesuai pengertian formalisasi Menurut (Heidmann et al., 2008) maka formalisasi menunjukkan tingginya standardisasi atau pembakuan tugas-tugas maupun jabatan dalam suatu organisasi. Semakin tinggi derajat formalisasi maka semakin teratur perilaku bawahan dalam suatu organisasi.

Formalisasi bisa dicapai melalui pengaturan yang bersifat on the job dimana organisasi akan menggunakan lebih banyak peraturan maupun prosedur untuk mengatur kegiatan karyawan. Akan tetapi, formalisasi juga bisa dicapai apabila latihan maupun pendidikan dilakukan di luar organisasi (off the job), yaitu sebelum seseorang menjadi anggota organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa formalisasi staff atas penerapan SIMDA Keuangan di BPKAD cukup baik sehingga penerapannya dapat terlaksana dengan baik dan dilaksanakan dengan senang hati oleh setiap pegawai dikarenakan dilakukan koordinasi tiap antara staff dengan pimpinan.

#### **4.3.1.5 Media**

Teori ini menempatkan semua media pada skala yang berkelanjutan berdasarkan kemampuan mereka untuk mengkomunikasikan pesan yang kompleks, bagi media yang dapat mengatasi perbedaan dengan efisien dan dapat mengklarifikasi masalah-masalah yang ambigu dianggap lebih sempurna dibandingkan dengan media komunikasi yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dapat menyampaikan pemahaman. Dengan sederhana dapat dijelaskan bahwa memilih media komunikasi untuk pesan tertentu sebagai upaya untuk mengurangi ketidakjelasan pesan atau penafsiran pesan yang salah, apabila pesan yang ada kurang tegas dan kurang jelas maka pesan akan mejadi ambigu dan sulit dimengerti oleh penerima pesan dan semakin tidak jelas pesan semakin banyak isyarat dan data yang diperlukan untuk menafsirkan dengan benar.

Berdasarkan hasil Wawancara yang dilakukan penulis bahwa media yang ada pada simda dapat mengelola data dan informasi yang dibutuhkan oleh staff BPKAD provsu secara tepat sehingga mempermudah komunikasi antara staff dan pimpinan. Namun, tidak dapat dilakukan pertukaran data diluar lingkungan simda.

#### **4.3.1.6 Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Menggunakan Simda**

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah selain diatur dengan Peraturan Pemerintah juga mengikuti Peraturan Menteri dan keuangan daerah juga mengikuti Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis.

Dengan penggunaan teknologi informasi, tugas-tugas para pengelola keuangan daerah akan semakin terbantu dan dapat menghasilkan formulir-formulir maupun laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pimpinan SKPD secara akurat dan tepat waktu. Penggunaan teknologi informasi di dalam pengelolaan keuangan daerah telah diakomodir dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 225 yang memperkenankan dipergunakannya aplikasi komputer dalam mengelola keuangan daerah sehingga dapat menghasilkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang berbasis komputer yang disebut dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang sudah diterapkan oleh BPKAD PROVSU Dengan penerapan Sistem

Informasi Manajemen Daerah tersebut, setiap pimpinan SKPD dapat memperoleh data dengan cepat berupa berapa besar persentase penyerapan dana masing-masing kegiatan pada masing-masing SKPD dari waktu ke waktu, sehingga diharapkan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara menjadi semakin efektif.

Berdasarkan hasil Wawancara yang penulis lakukan pada staff BPKAD PROVSU bahwa Pengelolaan keuangan yang dilakukan menggunakan aplikasi simda sudah efektif dimulai perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan pengelolaan keuangan tersebut yang dilakukannya sesuai aturan-aturan dan perundang-undangan.

Sesuai dengan indikator yang pengelolaan keuangan Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri (No.13, 2006), pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. pelaksanaan otonomi daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk mengola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisiensi, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

Simda yang diterapkan pada BPKAD PROVINSI SUMATERA UTARA sudah efektif untuk mengelola keuangan daerah . dapat dilihat dari indikator efektifitas simda yaitu Integrasi,Fleksibilitas,Aksesibilitas,Formalisasi,Media. Namun, eror kecil sudah terjadi dalam mengelola keuangan disebabkan karena simda tidak terintegrasi dengan aplikasi lain, simda masih kurang fleksibel dalam pengembangan programnya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa saran yaitu:

1. Untuk solusi simda tidak terintegrasi dengan aplikasi lain maka pihak BPKAD selaku operator simda harus memaksimalkan koordinasi-koordinasi dengan perusahaan yang ada agar proses pencatatan tidak bermasalah.
2. Untuk solusi kurangnya pengembangan pada program simda maka pegawai/staff BPKAD sebaiknya menyuarkan keluhan-keluhan dan saran pengembangan dalam rapat atau diskusi langsung dengan atasan. Pengelolaan keuangan harus mendapat komitmen yang tinggi dari pimpinan.
3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas lokasi penelitian sehingga dapat membandingkan dengan hasil pengujian yang ditemukan sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

1999, U.-U. N. 22 T. (1999). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999*. 1(10), 9–39.

Agung, K. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Penerbit Pembaharuan.

Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.

Ahadi, B., & Narimani, M. (2010). Relationships between type D personality and forgiveness. *Trakia Journal of Sciences*, 8(3), 50–52.

Ahmad, Y. (2002). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Grafindo.

Carl Van Horn dan Donal Van Meter. (1975). *model-model dalam Kebijakan Implementasi*.

EDWARD III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.

Halim, A. (2008). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.

Hall, J. (2001). *Sistem Informasi Akuntansi Buku 1*. Salemba Empat.

Hartono, B. (2013). *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer*. Rineka Cipta.

Heidmann, M., Schäffer, U., & Strahringer, S. (2008). Exploring the role of

management accounting systems in strategic sensemaking. *Information Systems Management*, 25(3), 244–257.

Jogiyanto, H. . (2009). *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Andi.

Journal, I., Di, S., Sumbawa, K., Fatimah, F., Indrayani, I., Febria, P., Yunus, Y., Putri, N. E., Sistem, I., Pengelolaan, I., Dan, D., Pegawai, K., Efektivitas, T., Daerah, P. K., Riset, K., Dan, T., Tinggi, P., Studi, P., Terapan, S., ... Hardjanto, K. (2019). Efektivitas Penerapan Aplikasi SIMDA Keuangan di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 1(1), 131–142.

Machmud, R. (2013). Peranan penerapan sistem informasi manajemen terhadap efektivitas kerja pegawai lembaga pemasyarakatan narkotika (lapastika) bollangi kabupaten gowa. *Jurnal Capacity STIE AMKOP Makassar*, 9(3), 409–421.

McGill, T., Hobbs, V., & Klobas, J. (2003). User developed applications and information systems success: A test of DeLone and McLean's model. *Information Resources Management Journal (IRMJ)*, 16(1), 24–45.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. In .

Mulyanto., A. (2009). *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.

Negeri, K. M. D. N. 29. (2002). Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Republik Indonesia*, 79–124.

- Nugroho, A. (2010). *ekayasa Perangkat Lunak Menggunakan UML & Java*. Andi Offset.
- pasal 386 Undang-undang no 23. (2014). Pemerintah Daerah. *Undang-Undang Republik Indonesia*, 460. <https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf>
- Pemerintah, konsep tual. (2003). *DHendianto-BiroHukum BPK-RI/5/26/2008 1. 1*, 1–40.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Pemerintah Republik Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. September*, 1–2. [http://www2.pom.go.id/public/hukum\\_perundangan/pdf/Pengamanan rokok bagi kesehatan.pdf](http://www2.pom.go.id/public/hukum_perundangan/pdf/Pengamanan_rokok_bagi_kesehatan.pdf)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2006). Government Regulation No. 8 year 2006 Concerning Financial Reporting and Performance of Government Agencies. <https://www.ut.ac.id/en/node/515>
- Raymond McLeod, J. (2010). *Management InformationSystem*. Prentice Hall.
- Robbins, Stephen P. dan Coulter, M. (2010). *Manajemen*. penerbit Erlangga.
- Rochaety, E., Ridwan Z, F., Setyowati, T. (2013). *Sistem Informasi Manajemen*. Mitra Wacana Media.
- Salehi, M., Rostami, V., & Mogadam, A. (2010). Usefulness of accounting information system in emerging economy: Empirical evidence of Iran. *International Journal of Economics and Finance*, 2(2), 186–195.
- Sigit. (2003). *Esensi Perilaku Organisasi*. Lukman Offset.

Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Erlangga.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Susanto, A. (2013). *Sistem Informasi Akuntansi, -Struktur-Pengendalian-Risiko-Pengembangan* (Edisi Perd). Lingga Jaya.

Sutarman. (2012). *Buku Pengantar Teknologi Informasi*". Bumi Aksara.

Sutrisno, E. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana Prenada Media.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004, T. P. D. (2004). Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. *Dpr*, 249. <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>

Xu, H. (2003). *Critical success factors for accounting information systems data quality*. University of Southern Queensland.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. **Data Pribadi**

Nama : Nafischa Erning Nabilah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tanggal Lahir : Sei Rotan/ 07 Januari 2000  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Dsn 2 Gg.Ismail N0.4 Sei Rotan  
Email : Nafischanabilah12@gmail.com  
No.Hp : 085373567121

### B. **Data Orang Tua**

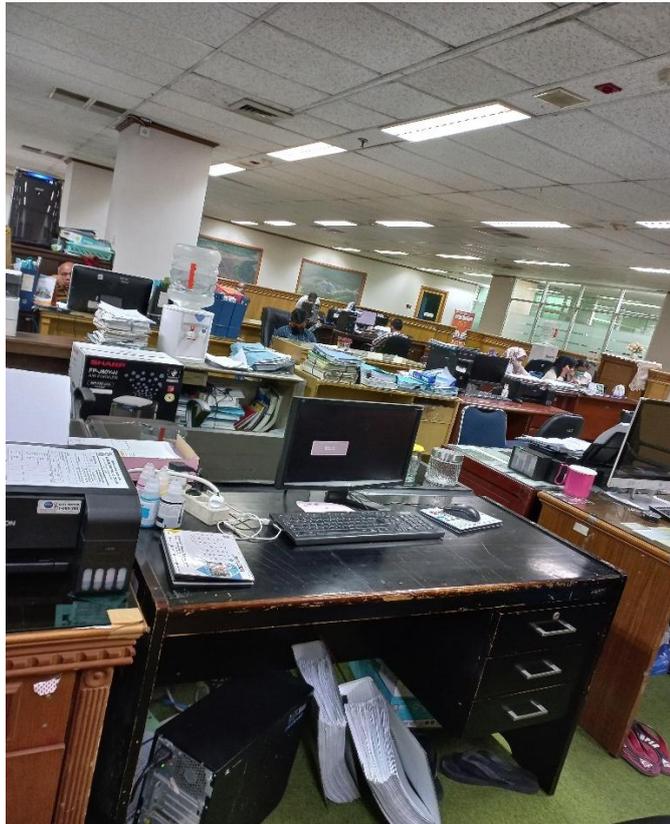
Nama Ayah : Eriawan, S.E  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Dsn 2 Gg.Ismail N0.4 Sei Rotan  
Nama Ibu : Surya Ningsih, S.Pd  
Pekerjaan : Guru  
Alamat : Dsn 2 Gg.Ismail N0.4 Sei Rotan

### C. **Data Pendidikan Formal**

Taman kanak-kanak : TK Dian Ekawati  
Sekolah Dasar : SD Negeri 105288  
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 29 MEDAN  
Sekolah Menengah Kejuruan : SMK Negeri 1 MEDAN  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

**LAMPIRAN**









## PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 02 Agustus 2021

Kepada Yth,  
Ketua/Sekretaris Program  
Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
UMSUDI  
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sayang bertandang di bawah ini:

Nama Lengkap : N A F I S C H A E N

NPM : 1 7 0 5 1 7 0 2 5 4

Tempat, Tgl. Lahir : S E I R O T A N  
0 7 J A N U A R I 2 0 0 0

Program Studi : Akuntansi  
Alamat Mahasiswa : D S N 2 G G I S M A I L N O 4 S E I R O  
T A N

Tempat Penelitian : B A D A N P E N G E L O L A A N K E U A  
N G A N D A N A S E T D A E R A H P R O  
V I N S I S U M A T E R A U T A R A

Alamat Penelitian : J L I M A M B O N J O L N O 1 8 G E D U  
N G B A N K S U M U T L T 7 M E D A N

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPPTa harap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui Ketua/Sek  
retaris Program Studi

(Zulia Hanum S.E., M.Si)

Wassalam  
Pemohon

(Nafischa Erning Nabilah)



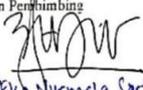
MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mulhatar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 2075/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/15/2/2021

Nama Mahasiswa : NAFISCHA ERNING NABILAH  
NPM : 1705170254  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
Tanggal Pengajuan Judul : 15/2/2021  
Nama Dosen pembimbing\*) : Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si  
Judul Disetujui\*\*) : Analisis Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah Untuk Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Provinsi Sumatera Utara.

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi  
  
(Fitriani Saragih, S.E., M.Si.)

Medan, Juni 2021  
Dosen Pembimbing  
  
(Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si.)

Keterangan:  
\*) Ditisi oleh Pimpinan Program Studi  
\*\*) Ditisi oleh Dosen Pembimbing  
Setelah disetujui oleh Prodi dan Dosen pembimbing, akan foto dan upload ke sistem ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 1756/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2021**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi  
Pada Tanggal : 04 juni 2021

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Nafischa Erning Nabilah  
N P M : 1705170254  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Efektifitas Sistem Manajemen Daerah Untuk Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara

Dosen Pembimbing : **Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 09 Agustus 2022**

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 30 Dzulhijjah 1442 H  
09 Agustus 2021 M



*C.c.File*

Dekan  
  
**H. Hamuri., SE., MM., M.Si**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 1752/II.3-AU/UMSU-05/F/2021 Medan, 30 Dzulhijjah 1442 H  
Lampiran : 09 Agustus 2021 M  
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan  
**Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara**  
Jln. Imam Bonjol Gedung Bank Sumut Lt.7 Medan  
di-  
Tempat

Assalamu `alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

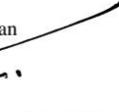
Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Nafischa Erning Nabilah  
Npm : 1705170254  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : VIII (Delapan)  
Judul Skripsi : Analisis Efektifitas Sistem Manajemen Daerah Untuk Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu `alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



  
Dekan  
**H. Januri., SE., MM., M.Si**

*C.c. File*



MAJELIS PENDIDIKAN TIGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri Ba No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Mahasiswa : Nafischa Erning Nabilah  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Nama Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari S.E., M.Si  
Judul Penelitian : Analisis efektifitas sistem manajemen daerah untuk pengelolaan keuangan daerah pada badan pengelolaan keuangan dan asset daerah provinsi Sumatera Utara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Fenomena masalah harus di dukung data	Juli 2021	
Bab 2	Perbaiki kerangka konseptual	Juli 2021	
Bab 3	Perhatikan analisis data	Juli 2021	
Daftar Pustaka			
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Angket kuesioner di perbaiki	Juli 2021	
Persetujuan Seminar Proposal	Acc proposal lanjut ke seminar	Agustus 2021	

Medan, Agustus 2021

Diketahui oleh  
Ketua Program Studi

**Zulia Hanum S.E., M.Si**

Disetujui Oleh  
Dosen Pembimbing

**Dr. EKA NURMALA SARI S.E., M.Si., Ak**



**MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Mughtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238**

**BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

Pada hari ini *Jumat, 27 Agustus 2021* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Nafischa Erning Nabilah*  
 NPM. : 1705170254  
 Tempat / Tgl.Lahir : Sei Rotan, 07 Januari 2000  
 Alamat Rumah : Jl.Medan-Btg kuis Dsn.2 Gg.Ismail No.4 Sei Rotan  
 Judul Proposal : Analisis Efektifitas Sistem Manajemen Daerah Untuk Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
<i>Judul</i>	
Bab I	-Tambahkan fenomena masalah dilatar belakang tentang dampak ketidak efektifitasan simda
Bab II	-Perbaiki cara pengutipan teori sesuaikan dengan pedoman skripsi -Perbaiki kerangka berfikir
Bab III	
Lainnya	-Perbaiki penulisan kalimat, tanda baca sesuai kaidah yang berlaku
Kesimpulan	Perbaikan Minor <span style="float: right;">Seminar Ulang</span> Perbaikan Mayor

Medan, 27 Agustus 2021

TIM SEMINAR

Ketua

Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., M.Si

Pembimbing

Dr. Eka Nuzumala Sari, SE, M.Si

Pembanding

Riva Ubar Harahap, SE., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN PROPOSAL**

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Jumat, 27 Agustus 2021* menerangkan bahwa:

Nama : Nafischa Erning Nabilah  
NPM : 1705170254  
Tempat / Tgl.Lahir : Sei Rötan, 07 Januari 2000  
Alamat Rumah : Jl.Medan-Btg kuis Dsn.2 Gg.Ismail No.4 Sei Rotan  
Judul Proposal : Analisis Efektifitas Sistem Manajemen Daerah Untuk Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si

Medan, 27 Agustus 2021

TIM SEMINAR

Ketua

Dr. Zulia Hanam, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., M.Si

Pembimbing

Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si

Pembanding

Riva Ubar Harahap, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui  
a.n.Dekan  
Wakil Dekan I



Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Gedung Bank Sumut Lantai 7

MEDAN

Medan, 20 Agustus 2021

Nomor : 041/2362/SEK/2021  
 Sifat :  
 Lampiran :  
 Perihal : Penelitian

Kepada Yth :  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
 Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

di -  
 Medan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor: 1752/II.3-AU/UMSU-05/F/2021 tanggal 09  
 Agustus 2021, Perihal Izin Riset Pendahuluan atas nama :

Nama : Nafischa Erning Nabilah  
 NIM : 1705170254  
 Jurusan : Akuntansi  
 Judul : Analisis Efektifitas Sistem Manajemen Daerah Untuk  
 Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan  
 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi  
 Sumatera Utara.

Dengan ini kami menyatakan bahwasanya Mahasiswa diatas akan  
 melaksanakan Penelitian, dari tanggal 23 Agustus s/d 23 November 2021  
 selanjutnya hasil penelitian tersebut dikirim ke Badan Pengelolaan Keuangan dan  
 Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan untuk urusan selanjutnya.

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
 KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SEKRETARIS,  
  
 Drs. HENDRAYUDI, M.Kes  
 PEMBINA TK. I  
 NIP. 19670818 199401 1 002





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 2332/II.3-AU/UMSU-05/F/2021 Medan, 18 Shafar 1443 H  
 Lamp. : - 25 September 2021 M  
 Hal : **Menyelesaikan Riset**

Kepada Yth.  
 Bapak/ Ibu Pimpinan  
**Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara**  
 Jln. Imam Bonjol Nomer 18 Gedung Bank Sumut Lt.7 Medan  
 Di-  
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Nafischa Erning Nabilah  
 N P M : 1705170254  
 Semester : IX (Sembilan)  
 Program Studi : Akuntansi  
 Judul Skripsi : Analisis Efektifitas Sistem Informasi Manajemen Daerah Untuk Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



  
 Dekan  
**H. Janur, SE., MM., M.Si**

C.c.File



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Gedung Bank Sumut Lantai 7

**MEDAN**

Medan, 6 Oktober 2021

Nomor : 071/2690/Sekes  
 Sifat :  
 Lampiran :  
 Perihal : Selesai Riset

Kepada Yth :  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
 Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

di -  
 Medan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor: 2332/II.3-AU/UMSU-05/F/2021 tanggal 25 September 2021, Perihal Menyelesaikan Riset atas nama :

Nama : Nafischa Erning Nabilah  
 NIM : 1705170254  
 Jurusan : Akuntansi  
 Judul : Analisis Efektifitas Sistem Manajemen Daerah Untuk Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dengan ini kami menyatakan bahwasanya Mahasiswa diatas telah melaksanakan Riset/Penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan untuk urusan selanjutnya.

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
 KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
 Pl. SEKRETARIS,



H. HENRI AGUSLAN, SE, M.Si  
 PEMBINA  
 NIP. 19690817 199003 1 005

## PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Medan : 07 Oktober 2021

Kepada Yth :  
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU Di  
Medan

Assalamualaikum Wr. Wb.  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

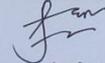
Nama Lengkap : NAFISCHA ERNING NABILAH  
N P M : 1705170254  
Program Studi : Akuntansi  
Alamat : Dsn. II Gg. Ismail NO. 4 Serotan  
Judul Skripsi : Analisis Efektifitas Sistem Informasi Manajemen daerah Untuk Pengelolaan Keuangan daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah provinsi Sumatera Utara

Mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian skripsi. Bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Transkrip Sementara & KHS Semester I s/d terakhir / KHS Remedial (Asli)
2. Surat keterangan telah menyelesaikan riset dari Instansi / Perusahaan.
3. Foto copy STTB / Ijazah terakhir dilegalisir 2 lembar dan foto copy Kartu Keluarga dan KTP seukuran A4 (2 lembar)
4. Konversi Nilai (bagi mahasiswa pindahan) – Asli.
5. Foto Copy Seluruh SKPI masing masing 1 lembar
6. Surat keterangan bebas pinjam buku dan tanda terima sumbangan buku dari perpustakaan UMSU.
7. Pas photo terbaru hitam putih ukuran 4 X 6 cm (10 Lembar). Pria memakai kemeja putih dan dasi panjang, wanita memakai blus lengan panjang + memakai Jas utk Pria & Wanita (Kertas Photo tidak yang licin).
8. Skripsi yang telah disyahkan. Lengkap tiga eksemplar dan Pengesahan Skripsi.
9. Permohonan dan lampiran 1 s/d 5 dimasukkan kedalam map warna biru.

Demikian permohonan ini saya perbuat atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Wassalam  
Pemohon



NAFISCHA ERNING NABILAH

Disetujui oleh  
a.n. Rektor  
Wakil Rektor I

Dekan



Prof. Dr. H. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

JANURI., SE., MM., M.Si

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Nama Lengkap : NAFISCHA ERNING NABILAH  
 N P M : 1705170254  
 Tempat/Tgl. Lahir : Seirotan, 07 Januari 2000  
 Program Studi : Akuntansi  
 Agama : Islam  
 Status Perkawinan : Belum  
 Alamat Rumah : Dgn. II Gg. Ismail NO.4 Seirotan  
 Pekerjaan/Instansi : \_\_\_\_\_  
 Alamat Kantor : \_\_\_\_\_

Melalui surat permohonan tertanggal 07 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan menempuh ujian Skripsi. Untuk itu saya, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk jawaban atas pertanyaan dari penguji
3. Menerima keputusan Panitia Ujian Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun.
4. Menyadari keputusan Panitia Ujian ini mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan, tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Medan, 07 Oktober 2021  
 Saya yang Menyatakan



NAFISCHA ERNING NABILAH